

Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif

Dienul Aslam Syukur, Hendra Pribadi, Bau Toknok, Wahyu Prianto, Syukur Umar, Amati Eltriman Hulu

Program Studi Kehutanan, Universitas Tadulka, Palu, Indonesia

Penulis korespondensi : Dienul Aslam Syukur

E-mail : dienul.info@gmail.com

Diterima: 02 Februari 2024 | Direvisi: 13 Maret 2024 | Disetujui: 14 Maret 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Pedesaan di Indonesia terus menghadapi tantangan signifikan terkait tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Hingga tahun 2020, data menunjukkan bahwa wilayah pedesaan menyumbang sekitar 12,82% tingkat kemiskinan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 7,28%. Terdapat optimisme terkait potensi pembangunan pedesaan yang efektif, mengingat kedekatan pedesaan dengan sumber daya alam nasional. Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa adalah inklusi sosial, yang menekankan pemenuhan hak-hak masyarakat, pemerataan ekonomi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Fokus utama saat ini adalah pengembangan wilayah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Peran kepemimpinan, terutama model kepemimpinan inklusif-kooptatif, semakin mendapat perhatian. Penelitian ini menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Metode ini bukan hanya untuk pengumpulan data, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan positif. Konsep struktur sosial dalam masyarakat tradisional Kulawi mencerminkan evolusi dalam kepemimpinan, khususnya melalui pendekatan inklusi-kooptatif. Meskipun ada konflik dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, terlihat bahwa inklusi sosial di pedesaan memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memastikan keberlanjutan pengembangan ekonomi dan sosial. Adopsi model kepemimpinan inklusif-kooptatif menjadi kunci untuk menggerakkan pembangunan pedesaan yang efektif, efisien, merata, dan berkeadilan.

Kata kunci: kepemimpinan, pembangunan desa, inklusi kooptative

Abstract

Rural areas in Indonesia continue to face significant challenges related to high levels of poverty. Until 2020, data shows that rural areas account for around 12.82% of the poverty rate, while in urban areas it is only 7.28%. There is optimism regarding the potential for effective rural development, considering the proximity of villages to national natural resources. One important aspect of village development is social inclusion, which emphasizes fulfilling community rights, economic equality, participation and community empowerment. The main focus currently is the development of rural areas to improve the welfare of people in remote areas. The role of leadership, especially the inclusive-cooptative leadership model, is receiving increasing attention. This research uses the Focus Group Discussion (FGD) method. This method is not only for data collection, but also as a tool for education and community empowerment, strengthening community capacity and participation in planning and implementing positive activities. The concept of social structure in traditional Kulawi society reflects the evolution in leadership, especially through an inclusive-cooptative approach. Even though there are conflicts in carrying out leadership functions, it appears that social inclusion in rural areas has a

positive impact on poverty alleviation. This approach creates an inclusive environment that allows active participation of all components of society, ensuring sustainable economic and social development. Adoption of an inclusive-cooptative leadership model is the key to driving effective, efficient, equitable and just rural development.

Keywords: leadership, village development, co-optative inclusion

PENDAHULUAN

Pedesaan di Indonesia terus menghadapi tantangan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hingga tahun 2020, wilayah pedesaan masih menjadi kontributor utama terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, menyumbang sebagian besar jumlah penduduk miskin di negara ini (Agustina & Yahya, 2022). Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,82%, sedangkan di perkotaan sebesar 7,28%. Meskipun terjadi penurunan kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir, namun penurunannya masih relatif kecil, yakni sekitar 0,29% per tahun. Oleh karena itu, optimisme terkait percepatan pembangunan pedesaan yang efektif masih sangat mungkin, mengingat keberadaan pedesaan yang umumnya sangat dekat dengan sumber daya alam nasional.

Walaupun implementasi program pembangunan desa seringkali menghadapi berbagai rintangan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah pembangunan desa memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Yetro M. Yoseph & Hidayat, 2018). Temuan ini mencerminkan keyakinan akan dampak positif yang dapat dicapai melalui investasi dalam pembangunan desa. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa pelaksanaan program-program tersebut mungkin menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal (Ahmed & Eklund, 2019). Pentingnya menangani kendala-kendala ini secara efektif ditekankan untuk mencapai hasil optimal dalam pembangunan desa. Dengan memahami tantangan ini, upaya penyempurnaan dan penyesuaian dalam pelaksanaan program pembangunan desa dapat menjadi kunci keberhasilan menuju masyarakat pedesaan yang lebih sejahtera dan mandiri.

Kemiskinan di pedesaan terjadi karena adanya eksklusi atau marginalisasi, sehingga masyarakat miskin tersebut tidak terlibat dan terpinggirkan dalam proses pembangunan. Berbagai program pengentasan kemiskinan sering kali menjadikan masyarakat desa sebagai kelinci percobaan, yang diperparah oleh ketidaktersentuhan terhadap perspektif pro poor dan responsif terhadap gender (Dakelan, Miftahul Huda, Acmad Murtafi Haris, 2016). Kekurangan ini mengakibatkan perencanaan pedesaan dan alokasi anggarannya tidak mencerminkan atau tidak berdampak pada peningkatan keadilan dan pemerataan.

Inklusi sosial merupakan evolusi dari konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menekankan pemenuhan hak-hak masyarakat, pemerataan ekonomi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat (Gutama & Widiyahseno, 2020). Meskipun demikian, diakui bahwa masih banyak hambatan dalam upaya meningkatkan inklusi sosial di pedesaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap permasalahan melalui proses deliberasi partisipatif masyarakat menjadi hal yang krusial (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Proses tersebut menghasilkan umpan balik dari setiap ide dan konsep perencanaan, di mana masyarakat akan menerjemahkan konsep yang ada sambil menjalani proses pembelajaran berkelanjutan.

Pengembangan wilayah pedesaan menjadi fokus utama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap peran kepemimpinan dalam mendorong perubahan positif di desa semakin meningkat (Andika dkk., 2021; Daud, 2017; Syafitri & Suriani, 2019). Desa-desa yang berhasil sering kali dipimpin oleh pemimpin yang inklusif dan mampu menggalang partisipasi seluruh penduduknya. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah (Pribadi dkk., 2021; Sirenden dkk., 2024), model kepemimpinan kooptatif menjadi alternatif menarik yang menjanjikan, terutama ketika diimplementasikan dengan prinsip inklusi.

Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif

Pengabdian masyarakat ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan inklusif dapat membentuk desa yang partisipatif dan kompetitif. Dengan menganalisis best practices dan menyelidiki dampak konkret yang telah terjadi. Pengabdian ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang relevansi dan efektivitas model kepemimpinan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Metode pengabdian yang digunakan adalah Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan semua keterwakilan komponen masyarakat Desa Toro, baik unsur pemerintahan desa, masyarakat adat, organisasi perempuan (Opan), serta kelompok minoritas dan difabel. FGD dapat mengumpulkan berbagai potensi yang terdapat dalam masyarakat secara partisipatif dan sekaligus sebagai instrument sosialisasi yang efektif (Aulia dkk., 2022; Hasibuan & Sidabutar, 2020; Wijaya & Perdana, 2023).

FGD digunakan karena telah terbukti menjadi metode yang sangat efektif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, memungkinkan penyelenggara untuk secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sasaran. Dalam konteks pengabdian masyarakat, FGD dapat digunakan sebagai alat untuk menggali pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan membentuk kelompok diskusi terarah, para penyelenggara dapat mendengarkan berbagai pandangan, pengalaman, dan ide-ide dari peserta yang mewakili berbagai segmen masyarakat. Proses dialog ini memungkinkan para penyelenggara untuk merancang kegiatan pengabdian yang lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan nyata masyarakat yang dilayani.

Kelebihan FGD sebagai metode pengabdian masyarakat terletak pada kemampuannya untuk membangun interaksi langsung antara penyelenggara dan masyarakat. FGD menciptakan ruang untuk pertukaran informasi dan gagasan secara terbuka, memungkinkan para peserta untuk merasa didengar dan dihargai. Selain itu, FGD dapat menjadi forum untuk merencanakan solusi bersama dengan masyarakat, memperkuat prinsip partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Aktivitas yang memperlihatkan pelaksanaan FGD Pengabdian pada Masyarakat, diantaranya penentuan skala prioritas bagi pembangunan desa (A), diskusi dalam kelompok beserta fasilitator (B), beberapa skala prioritas pembangunan (C), dan analisis data (D).

Selain sebagai alat untuk pengumpulan data dan pemahaman masyarakat, FGD juga dapat berperan sebagai wahana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui dialog terstruktur, peserta FGD dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan satu sama lain, menciptakan suasana pembelajaran yang saling memberdayakan. Dengan demikian, FGD bukan hanya menjadi metode

Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif

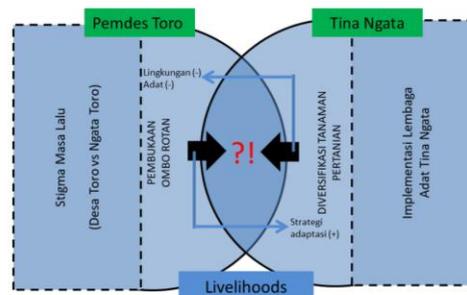
penelitian, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berdampak positif.

Beberapa dokumentasi berikut memperlihatkan kegiatan FGD yang dilaksanakan selama pengabdian masyarakat di Desa Toro pada bulan Desember 2023 yang lalu (Gambar 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kulawi menunjukkan kearifan dalam menjalani kehidupan, baik dalam interaksi antarmanusia maupun dalam kaitannya dengan alam sekitar. Pranata sosial-budaya yang mereka anut memiliki dua nilai utama, yakni Hintuwu dan Katuvua. Nilai-nilai Hintuwu menjadi landasan dalam menjalin hubungan antarindividu, sementara Katuvua mencakup norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan alam. Kedua nilai ini menjadi pondasi utama dalam konteks hubungan sosial, memerlukan pemahaman dan penghayatan bersama sebelum melibatkan diri dalam berbagai aktivitas nyata. Aturan tradisional mengenai interaksi manusia dengan arwah leluhur atau entitas astral (Topehai), yang dikenal sebagai pekahovia, juga turut menjadi bagian integral dari norma-norma masyarakat Kulawi.

Untuk memastikan pelaksanaan filosofi hintuwu-katuvua, kepemimpinan di masyarakat adat Kulawi dibagi menjadi tiga peran utama, yakni Maradika, Totua ngata, dan Tina ngata. Dalam struktur kepemimpinan formal desa, Maradika bertindak sebagai Kepala Desa sesuai dengan tradisi masyarakat adat. Sebagai kepala desa, ia tidak hanya didukung oleh aparat desa sesuai dengan norma formal yang berlaku, tetapi juga mendapat dukungan dari Totua ngata dan Tina ngata. Totua ngata memiliki peran sentral dalam pengaturan dan pengawasan terhadap aturan adat yang berlaku, sedangkan Tina ngata memiliki peran khusus dalam perencanaan kegiatan pertanian di desa dan bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di masyarakat.



Gambar 2. Ilustrasi simplifikasi permasalahan pencabutan *ombo rotan* di Desa Toro.

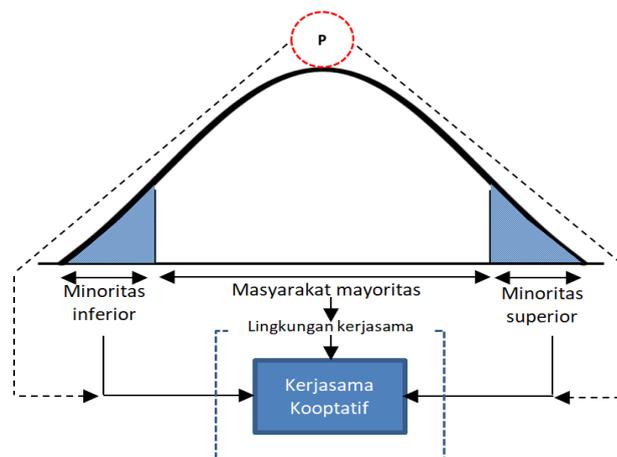
Meskipun tampaknya konsep struktur sosial dalam masyarakat tradisional Kulawi dapat mengalami inovasi dengan mengadopsi pendekatan kepemimpinan inklusi-kooptatif, namun unsur-unsur kepemimpinan sering menghadapi konflik dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan memajukan desa. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat dan pemerintahan Toro, keputusan akhir yang diambil oleh Maradika atau kepala desa tidak selalu sejalan dengan rekomendasi yang diajukan oleh Tina Ngata, terutama terkait dengan pencabutan ombo rotan.

Pemerintah desa secara rutin menggelar musyawarah internal dengan Lembaga Adat Toro untuk membahas segala permasalahan yang akan diajukan ke tingkat pemerintahan kecamatan dan kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Desa sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, terutama dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ilustrasi di atas mencerminkan konsekuensi yang harus diambil oleh Pemerintah Desa Toro sebagai langkah antisipatif terhadap dampak sosial ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat Toro. Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa Toro memutuskan untuk membuka ombo rotan, meskipun rekomendasi Tina Ngata masih menimbulkan keraguan terhadap keputusan yang diambil.

Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif

Pada saat itu, pendapatan masyarakat Toro sangat terdampak oleh merebaknya pandemi Covid-19, yang semakin memperparah kondisi kehidupan mereka. Keputusan untuk membuka kembali ombo rotan juga didasari oleh pertimbangan bahwa peraturan tersebut sudah berlaku lebih dari lima tahun, suatu periode yang dianggap cukup lama oleh kepala desa. Oleh karena itu, kepala desa bersama beberapa perangkat desa dan masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, setuju untuk mengambil tindakan cepat dengan membuka ombo rotan sebagai sumber pendapatan di tengah krisis ekonomi dan kesehatan. Meskipun demikian, prosedur yang seharusnya diikuti agak terabaikan, menyebabkan terjadinya kesalahpahaman.

Pada kehidupan masyarakat yang inklusif akan tumbuh kooptasi sosial di mana kerja sama merupakan proses yang dibutuhkan yang memungkinkan diterimanya unsur-unsur baru dalam sebuah kepemimpinan (Anam dkk., 2021; Daud, 2017; Rawat dkk., 2021). Kerja sama yang kooptatif memungkinkan proses penyesuaian yang diharapkan dapat mempertahankan stabilitas bagi suatu otoritas dalam menghadapi suatu ancaman. Maka yang akan terjadi adalah sebuah kepemimpinan yang kooptatif, yaitu kepemimpinan inklusif yang menjembatani pihak-pihak yang berbeda, misalnya kelompok minoritas superior dengan kelompok minoritas inferior. Gambar 3 merupakan model kepemimpinan inklusif-kooptatif.



Gambar 3. Model kepemimpinan inklusif-kooptatif.

Pemimpin (P) yang memiliki kepemimpinan inklusif-kooptatif akan mengembangkan mekanisme kerja sama antara pihak yang kuat dengan pihak yang lemah. Pihak yang kuat bisa saja merupakan kelompok minoritas superior eksklusif yang kuat, sementara kelompok yang lemah merupakan golongan minoritas eksklusif yang lemah. Orang-orang kuat secara finansial belum tentu memiliki relasi sosial yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja muncul hambatan sosial di mana orang-orang yang kuat secara finansial tereksklusi. Sehingga ada kesulitan berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada yang lain.

Semakin gencarnya pembangunan yang inklusif di Indonesia dewasa ini maka telah hadir tiga perubahan mendasar dalam masyarakat yang merupakan kebutuhan pembangunan (Anam dkk., 2021; Andani & Wibawa, 2022). Ketiga perubahan itu adalah merebaknya gerakan inklusi sosial yang dilakukan oleh para kader; semakin baiknya penerimaan sosial, yaitu melibatkan kaum marginal dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan sebagai konsekuensi maka terjadi pelayanan yang lebih berkualitas terhadap masyarakat. Sebagai sebuah framework dalam melakukan advokasi, inklusi sosial akan sangat efektif mengangkat martabat dan harga diri (*dignity*) semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sosialnya.

Mengembangkan inklusi dalam kehidupan dan pembangunan di pedesaan diharapkan akan memberikan setidaknya tiga keistimewaan, yaitu: (1) melibatkan dan mengembangkan banyak cara untuk mengetahui yang seharusnya ingin diketahui (*engaged multiple way of knowing*); (2) semua komponen masyarakat akan secara bersama-sama menghasilkan proses dan isi keputusan yang

Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif

mereka lakukan (*all parties coproduced the process and content of their decision making*); (3) mempertahankan keterbukaan (*sustaining temporal openness*). Pengetahuan, proses perlibatan, dan keterbukaan merupakan pilar penting partisipatif –inklusif yang akan menggiring pembangunan pedesaan yang efektif, efisien dan merata serta berkeadilan. Dan ketiga pilar ini berintikan nilai kepedulian, baik kepedulian pribadi maupun kepedulian sosial atau kepedulian bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

Mengasselerasi pengentasan kemiskinan di pedesaan berbasis potensi setempat dapat dilakukan dengan mengadopsi model Kepemimpinan Inklusi-Kooptative di mana komponen minoritas superior diberikan tempat secara luas dan efektif untuk berkontribusi pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan, terutama masyarakat marginal. Pendekatan ini bertujuan untuk merangkul dan memanfaatkan potensi setempat agar masyarakat desa dapat aktif terlibat dalam proses pengembangan ekonomi dan sosial. Fokus utama dari model ini adalah memberikan peluang kepada masyarakat marginal untuk berkontribusi secara signifikan dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Dengan memberikan tempat yang signifikan kepada komponen minoritas, baik dalam pengambilan keputusan maupun implementasi program, model ini dapat menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan potensi setempat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat jaringan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan demikian, melalui pendekatan kepemimpinan inklusif-kooptatif, pengentasan kemiskinan dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di pedesaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. E., & Yahya, A. (2022). Pembangunan Desa Dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 98–108.
- Ahmed, S., & Eklund, E. (2019). Rural Accessibility, Rural Development, and Natural Disasters in Bangladesh. *Journal of Developing Societies*, 35(3), 391–411.
- Anam, C., Hastuti, T., & Rosyanti, D. M. (2021). Komponen – Komponen Inclusive Leadership Pada Sektor Pendidikan Dan Organisasi in Society 5.0. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 146–150.
- Andani, N. W. R., & Wibawa, I. M. A. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap Perilaku Inovatif Karyawan Dimediasi Oleh Perceived Organizational Support. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11(2), 210.
- Andika, W. A., S. B. U., & Sulistio, E. B. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(2).
- Aulia, A., Wardani, L. E., Prayitno, G., Adrianto, D. W., Oktania, S. A., Yudhistira, T., & Putri, D. M. K. (2022). Pendampingan Focus Group Discussion Pemetaan Potensi Desa Bangelan, Kabupaten Malang. *TEKAD : Teknik Mengabdikan*, 1(1), 1–8.
- Dakelan, Miftahul Huda, Acmad Murtafi Haris, A. D. (2016). *Mewujudkan desa Inklusif (Perencanaan Pro Poor dan Responsif Gender)* (S. Mastudi, Ed.; Cetakan I). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634.
- Daud, Y. (2017). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik (Studi Di Dusun Aholeang Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2(2), 62–76.
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80.

Membina kesejahteraan kolektif: kepemimpinan kooperatif inklusif dalam membangun desa partisipatif dan kompetitif

- Hasibuan, M. S. R., & Sidabutar, L. (2020). Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Urban: Elaborasi Hasil Focus Group Discussion (Fgd) Perencanaan Taman Maju Bersama Di Kelurahan Gandaria Utara Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 26(3), 142.
- Pribadi, H., Jumiayati, S., Muis, A., Widnyana, I. K., & Mustabi, J. (2021). Diversification of Local Tubers through Optimization of Cocoa Farming in Supporting Sustainable Food Security. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1), 012089.
- Rawat, P. S., Lyndon, S., Pradhan, M. R., Jose, J., Kollenchira, M., & Mehta, G. (2021). Employee reactiveness and inclusive leadership: time to manage emotional diversity. *South Asian Journal of Business Studies*, 10(3), 357–376.
- Sirenden, D., Golar, Maiwa, A., & Hulu, A. E. (2024). Participation Level Of Karava Jaya Forest Farmer Group And Sustainable Forest Farmer Group In Gumbasa Sub-District. *Jurnal Savana Cendana*, 9(1), 36–41.
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44–54.
- Wijaya, M. A., & Perdana, C. (2023). Perancangan Focus Group Discussion Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Berbasis Website. *Jurnal Sistem Informasi Galuh*, 1(2), 59–67.
- Yetro M. Yoseph, M. S., & Hidayat, T. (2018). Effectiveness Of Use Of The Budget Fund One Billion IDR One Village. *European Journal of Social Sciences Studies*, 286–298.